

Menyama Braya

Sebagai Upaya Membangun Kerukunan Hidup Umat Beragama di Bali

oleh Paskalis Nyoman Widastra* - Denpasar

Abstract:

Living in harmony with one another is one of the main problems in our modern society. To promote such a humane life, especially in this mobile and multicultural society, should be the effort of everybody. People of every kind of social life and religious background are expected to offer their contribution for *bonum commune* (common good), particularly in treating others as neighbours. In fact, every religion and culture has inherently such value which enculturates its members to treat others as their brothers and/or sisters. This paper highlights one of the Balinese traditional values, the so-called '*menyama braya*' way of thinking and of behaving, which means 'living together as brother and sister'. This kind of local genius - although *menyama braya* sounds out of date - seems to be needed in our more and more intolerant society. Basically *menyama braya* (brotherhood or sisterhood), which springs out of the heart of Balinese religious culture that has enculturated its people for centuries, promotes harmony in the society, where everybody could feel at home and lives comfortably. The writer encourages everybody of good will to elaborate again and again this human value, primarily in and for Balinese context and also within our multicultural society of today.

Keywords: dialog, keragaman, kerukunan, *menyama braya*.

1. Pengantar

Mengangkat tema *menyama braya* (hidup sebagai saudara) dalam konteks sekarang ini tidaklah gampang. Pertama, berkaitan dengan sikap kritis jaman ini. Jangan-jangan apa yang mau dibicarakan sudah tidak relevan dan menghambat kemajuan atau mengerdilkan cara berpikir modern jaman ini. Kedua, *menyama braya* jangan-jangan merupakan slogan indah masa lalu yang diwariskan oleh jaman sebelumnya yang sudah tidak relevan lagi untuk situasi sekarang ini. Berkedok di balik nilai luhur budaya bangsa, jangan-jangan justru malah menyuburkan feodalisme yang membuat orang *sungkan* untuk me-

* Penulis adalah alumnus S2 kajian budaya dari Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Disamping giat dalam aktivitas-aktivitas lintas agama di Keuskupan Denpasar, penulis juga adalah direktur Perpustakaan 'Widya Wahana - Simon Buis Memorial' di Tuka, Bali.

nyampaikan pandangan-pandangan kritisnya. Dalam era globalisasi ini kita dihadapkan pada situasi yang berbeda, lebih-lebih dalam pola pikir dan pola pandang. Apa yang semula dipandang baik justru dianggap kuno dan ketinggalan jaman.

Tulisan ini justru berupaya menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa *menyama braya* sebagai warisan nilai masa lalu tetap relevan untuk menjawab tantangan kehidupan bersama dalam konteks keberagamaan, khususnya Bali. Oleh sebab itu kita ingin menempatkan *menyama braya* dalam konteks budaya dan juga dalam konteks kehidupan umat beragama yang akhir-akhir ini sangat rentan dengan konflik baik ke dalam maupun ke luar. Dalam skala yang lebih luas, Indonesia tentu sangat berkepentingan dalam menerapkan warisan nilai budaya bangsa, lebih-lebih karena pengalaman masa lalu dan harapan masa depan yang senantiasa mengedepankan kerjasama, kerukunan, gotong royong dan tepaselira, saling asah, saling asih dan saling asuh.

2. *Menyama braya*

*Menyama braya*¹ dalam konteks budaya tertentu mendapat bentuk yang solid manakala ada dukungan dari komponen masyarakat dan sudah dianggap sebagai sebuah tradisi. Misalnya *pelagadong* di daerah Maluku dianggap sebagai bentuk hubungan kekerabatan kakak beradik di mana komunitas yang berbeda memperlakukan yang lain sebagai saudara. Oleh sebab itu perbedaan bukan menjadi persoalan yang utama karena yang ditekankan adalah persaudaraan. Ini penting terutama bilamana berhadapan dengan persoalan-persoalan yang bersifat sensitip. Misalnya menyangkut perkawinan yang menukik pada persoalan agama. Namun bilamana hal ini sudah mencair oleh prinsip hubungan sebagai saudara maka persoalan bisa diatasi.

Sedangkan dalam kehidupan masyarakat Bali yang menjadi konteks kita adalah hubungan intern masyarakat dan antar masyarakat. Setiap individu atau *krama* masyarakat wajib membangun kehidupan yang harmonis dengan sesamanya. Tidak seorang pun bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan orang lain, lebih-lebih hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama menyangkut kematian, perkawinan, adat istiadat maupun kepentingan lainnya. Prinsip *menyama braya* dengan segala hak dan kewajiban tentu sangat ditekankan.

¹ *Menyama braya* secara leksikal berasal dari kata *nyama* (=saudara) *braya* (=keluarga dekat). *Menyama braya* berarti menganggap orang lain atau kelompok lain sebagai bagian dari keluarganya atau sebagai bagian dari komunitasnya.

Demikian juga dalam kaitannya dengan hubungan antar *banjar* (rukun tangga). Ada hal-hal yang membuat hubungan antar *banjar* menjadi terganggu. Misalnya menyangkut batas wilayah, tempat-tempat suci maupun menyangkut hubungan antar warga. Menghadapi persoalan semacam ini prinsip *menyama braya* sangat ditekankan.

Oleh dinamika masyarakat yang sudah merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan, maka komunitas yang semula homogen pelan-pelan berubah menjadi masyarakat yang heterogen. Kenyataan seperti ini menuntut pemahaman yang lebih luas tentang *menyama braya*. *Menyama braya* tidak hanya berlaku intern tetapi juga ekstern menyangkut hubungan antar masyarakat yang berbeda agama, budaya, dan suku atau ras. Pada awal mulanya ada semacam penolakan tetapi mengingat kepentingan yang lebih luas, apalagi menyangkut kesatuan sebagai sebuah bangsa maka *menyama braya* menjadi suatu keharusan. Bahkan untuk saat ini *Menyama braya* terbuka untuk bangsa-bangsa lain yang datang dan pergi sebagai wisatawan baik domestik maupun manca negara. *Menyama braya* semakin mengokohkan fakta bahwa dunia ini adalah sebagai *a big village* atau sebagai sebuah kampung besar.

Namun lepas dari keindahan hidup sebagai saudara (*menyama braya*) relasi masyarakat menuju kepada situasi yang harmoni dan integrative, tetap menghadapi tantangan yang tidak kecil. Beberapa kasus berkaitan dengan konflik baik yang bersifat vertical maupun horizontal selalu menjadi batu ujian yang berat untuk meletakkan sendi-sendi yang kokoh dalam membangun persaudaraan yang sejati (*menyama braya*). Pertama berkaitan dengan fanatisme – baik menyangkut suku, agama – yang sempit ternyata menjadi kendala yang luar biasa. Memandang sesama manusia sebagai yang lain, adalah sejarah panjang yang tetap berlangsung pada jaman modern ini.

Kedua, berkaitan dengan kepentingan-kepentingan baik menyangkut individu, kelompok maupun partai seringkali akhirnya mengorbankan kebenaran dan nilai-nilai yang lebih luhur. Jadilah kita manusia yang mata gelap dalam memberikan pembelaan terhadap orang atau kelompok yang belum tentu benar. Dalam hal ini kepentingan ekonomi, politik dan sosial budaya sangat memberi peluang ke arah yang menyimpang dalam memberikan pembelaan yang jujur dan bermartabat.

Ketiga, hadirnya provokasi yang tidak bertanggungjawab, ikut juga menambah keruh suasana. Dalam hal ini isu-isu di tengah-tengah masyarakat yang tidak dikritisi besar kemungkinan akan melahirkan situasi yang kacau. Akibatnya kecurigaan masyarakat bertambah besar dan ujungnya adalah pengusiran terhadap individu atau kelompok masyarakat. Kenyataan seperti

ini yang sering terjadi di tengah masyarakat dan bahkan sangat sulit untuk dikendalikan.

Keempat, tiadanya kepemimpinan yang kuat dan bisa berpegang teguh pada nilai-nilai yang disepakati bersama juga menjadi faktor yang tidak kalah dalam memberi kontribusi munculnya situasi yang tidak kondusif dalam membangun kebersamaan. Dalam hal ini kita tentu membutuhkan kehadiran pemimpin yang berwawasan luas, yang arif bijaksana dan yang tidak memihak. Namun kehadiran seorang pemimpin sering kali terkooptasi oleh kepentingan kelompok sehingga ruang geraknya pun menjadi sangat terbatas. Kata-katanya tidak lagi melahirkan kekuatan yang berwibawa, sebaliknya justru menjadi bumerang dalam dirinya yang justru akan menghancurkan citra dirinya.

3. Indonesia Negara Besar

Batasan (definisi) untuk "Negara Besar" lebih-lebih dilihat dari jumlah penduduk luas wilayah dan keberagaman etnik di dalamnya. Jumlah penduduk di atas 200 juta menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar keempat setelah China, India, dan Amerika. Jumlah yang banyak ini menjadi bermasalah manakala terjadi ketidakseimbangan dengan luas wilayah. Bali dengan jumlah penduduk di atas 3 juta dengan luas wilayah tidak lebih dari 6000 km² (5808,8 km²) termasuk dalam kategori yang sangat padat jumlah penduduknya. Demikian juga dengan Pulau Jawa yang dianggap paling problematik karena sebagian besar (60%) jumlah penduduk justru tinggal di pulau yang terbesar nomor lima setelah Kalimantan, Irian, Sumatra, dan Sulawesi. Situasi yang demikian ini berdampak pada dinamika masyarakat yang harus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain.

Indonesia sebagai negara besar terdiri dari keberagaman suku, yang juga beragam dalam bahasa, adat istiadat, tradisi dan juga agama. Pada jaman penjajahan, ada upaya untuk membuat garis demarkasi untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan agama. Warisan itu nampak sampai sekarang dengan stigma yang menjadi ciri khas masing-masing kawasan atau pulau. Untuk Bali, Hindu menjadi ciri khas pulau ini, sehingga begitu mendengar nama 'Bali', maka wilayah ini identik dengan kawasan seribu pura. Begitu pula dengan daerah-daerah lain. Lombok misalnya, dikatakan sebagai pulau seribu masjid dan Sulawesi Utara diidentikan dengan propinsi seribu gereja. Realitas seperti ini sangat mempengaruhi interaksi masyarakat yang pada ujungnya menciptakan kesenjangan komunikasi.

Indonesia sebagai *state* bisa juga dilihat dari cita-cita negara yang menempatkan Pancasila sebagai simbol dan nilai yang mempersatukan. Banyak

ini yang sering terjadi di tengah masyarakat dan bahkan sangat sulit untuk dikendalikan.

Keempat, tiadanya kepemimpinan yang kuat dan bisa berpegang teguh pada nilai-nilai yang disepakati bersama juga menjadi faktor yang tidak kalah dalam memberi kontribusi munculnya situasi yang tidak kondusif dalam membangun kebersamaan. Dalam hal ini kita tentu membutuhkan kehadiran pemimpin yang berwawasan luas, yang arif bijaksana dan yang tidak memihak. Namun kehadiran seorang pemimpin sering kali terkooptasi oleh kepentingan kelompok sehingga ruang geraknya pun menjadi sangat terbatas. Kata-katanya tidak lagi melahirkan kekuatan yang berwibawa, sebaliknya justru menjadi bumerang dalam dirinya yang justru akan menghancurkan citra dirinya.

3. Indonesia Negara Besar

Batasan (definisi) untuk "Negara Besar" lebih-lebih dilihat dari jumlah penduduk luas wilayah dan keberagaman etnik di dalamnya. Jumlah penduduk di atas 200 juta menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar keempat setelah China, India, dan Amerika. Jumlah yang banyak ini menjadi bermasalah manakala terjadi ketidakseimbangan dengan luas wilayah. Bali dengan jumlah penduduk di atas 3 juta dengan luas wilayah tidak lebih dari 6000 km² (5808,8 km²) termasuk dalam kategori yang sangat padat jumlah penduduknya. Demikian juga dengan Pulau Jawa yang dianggap paling problematik karena sebagian besar (60%) jumlah penduduk justru tinggal di pulau yang terbesar nomor lima setelah Kalimantan, Irian, Sumatra, dan Sulawesi. Situasi yang demikian ini berdampak pada dinamika masyarakat yang harus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain.

Indonesia sebagai negara besar terdiri dari keberagaman suku, yang juga beragam dalam bahasa, adat istiadat, tradisi dan juga agama. Pada jaman penjajahan, ada upaya untuk membuat garis demarkasi untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan agama. Warisan itu nampak sampai sekarang dengan stigma yang menjadi ciri khas masing-masing kawasan atau pulau. Untuk Bali, Hindu menjadi ciri khas pulau ini, sehingga begitu mendengar nama 'Bali', maka wilayah ini identik dengan kawasan seribu pura. Begitu pula dengan daerah-daerah lain. Lombok misalnya, dikatakan sebagai pulau seribu masjid dan Sulawesi Utara diidentikan dengan propinsi seribu gereja. Realitas seperti ini sangat mempengaruhi interaksi masyarakat yang pada ujungnya menciptakan kesenjangan komunikasi.

Indonesia sebagai *state* bisa juga dilihat dari cita-cita negara yang menempatkan Pancasila sebagai simbol dan nilai yang mempersatukan. Banyak

pihak, khususnya pihak luar melihat bahwa Indonesia tetap bertahan karena Pancasila masih dipegang teguh yang mengusung kebhinnekaan sebagai motto bersama. Walaupun berbeda tetapi tetap satu juga. Di dalam Pancasila, Indonesia menempatkan Tuhan yang maha esa sebagai keyakinan yang dihayati dalam masing-masing komunitas agama dan kepercayaan. Indonesia juga menempatkan nilai, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sebagai nilai yang harus menjiwai seluruh Bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan keberagaman dalam keyakinan, walaupun semuanya mengalir dari sumber yang satu dan sama, ternyata dalam banyak hal kita belum sepakat. Masih ada upaya untuk menempatkan keberbedaan keyakinan sebagai sebuah hambatan yang akhirnya mempengaruhi relasi satu sama lain. Bahkan keyakinan yang berbeda mempunyai daya pengaruh yang lebih luas dalam tatanan kehidupan sosial daripada perbedaan suku. Di samping itu sikap intoleran juga masih nampak dalam menyikapi kelompok minoritas dan juga dalam menyikapi keyakinan yang sedikit berbeda. Penolakan akan perbedaan ini bahkan menjadi sangat ironis dibandingkan dengan misi agama yang selalu mengedepankan persaudaraan, perdamaian dan keadilan. Tidak sedikit yang harus menjadi korban akibat sikap yang tidak toleran ini. Menurut Franz Magnis-Suseno SJ, intoleransi ini sangat mengancam masa depan bangsa (*Jawa Pos* 21 Mei 2008)

Berikutnya adalah masalah kemanusiaan. Bersama sebagai sebuah bangsa, kita mengalami pahitnya jati diri sebagai sebuah bangsa yang terjajah selama ratusan tahun. Sepertinya tidak ada harapan untuk keluar dan lahir sebagai sebuah bangsa yang merdeka, kalau tidak dipelopori oleh orang-orang yang mempunyai pikiran jauh ke depan. Misalnya perhimpunan Budi Oetomo yang telah menorehkan tinta emas untuk mempersiapkan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Waktu itu untuk pertama kalinya diper-maklumkan persatuan keanekaan suku untuk bersama-sama memerangi penjajahan dengan segala resiko yang harus mereka hadapi. Kini kita terlahir sebagai bangsa yang merdeka.

Situasi ini sudah seharusnya memberikan pelajaran yang sangat berharga, apalagi dengan amanat kemerdekaan yang menghendaki penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Indonesia sebagai sebuah bangsa sungguh sangat memahami bahwa manusia dengan segala kemanusiaannya adalah manusia yang bersifat pribadi, unik, bermartabat dan sederajat. Hal ini sangat mengagumkan apalagi mengingat latar belakang kesukuan masing-masing wilayah Indonesia yang masih mempertahankan kerajaan baik secara terbuka maupun terselubung.

Realitas kemanusiaan sebagai perwujudan pengalaman sila kedua menyisakan trauma kemanusiaan yang alang kepala sangat menyakitkan. Mulai dari tragedi 1965 yang sampai saat ini tidak ada penyelesaian hukum yang mengakibatkan ribuan manusia harus meregang nyawa. Kejadian yang mengerikan ini masih harus berlangsung dalam tahun berikutnya yang meluluh lantakkan nilai-nilai persaudaraan. Justru karena keyakinan yang berbeda, konflik yang bernuansa agama ini telah mengakibatkan jatuhnya sekian ribu korban dan pengungsian besar-besaran. Inilah fakta sejarah yang dicatat dan direkam dalam jaman kemerdekaan memasuki penghujung tahun 2000. Nilai manusia menjadi sangat rendah dan bahkan lebih hina dari makhluk hewani.

Persatuan Indonesia ditandai oleh tekad bersama untuk berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan bertanah air satu tanah air Indonesia. Kenyataan ini membuat kita bangga. Walaupun bahasa ibu berbeda tetapi bahasa Indonesia telah menjadi jembatan emas yang mempersatukan kita semua. Demikian juga kenyataan kita sebagai sebuah bangsa yang walaupun berbeda suku, ternyata di atas segala-galanya pilihan rasa kebangsaan sebagai Bangsa Indonesia adalah yang utama. Demikian juga dengan wilayah yang luas ini menjadi begitu dekat oleh adanya kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke di mana pulau-pulau dipersatukan oleh luasnya laut dengan segala kekayaannya.

Namun persatuan Indonesia ini tidak bisa dikatakan selesai. Persatuan adalah proses yang terus menerus harus diperjuangkan dan bahkan harus terus menerus diuji lebih-lebih dalam situasi yang sangat sulit. Khususnya berkaitan dengan problem-problem besar bangsa ini berhadapan dengan kemiskinan, pengangguran, konflik-konflik dan juga masalah-masalah lain yang seringkali menimpa bangsa yang besar ini. Persatuan apalagi kalau ditempatkan dalam konteks keanekaragaman membuat kita harus menempatkan kepentingan bersama di atas segala-galanya. Namun musuh persatuan adalah egoisme; manusia yang seringkali hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Persatuan akhirnya hanya menjadi slogan belaka dan hanya dikumandangkan pada saat seremoni sehingga bersifat ritual semata.

4. *Menyama braya* Dalam Konteks Kerukunan Antar Umat Beragama di Bali

Sejak berdirinya FKAUB (Forum Komunikasi Antar Umat Beragama) Februari 1999, *menyama braya* di Bali menjadi dasar dan sekaligus pilar dalam merajut komunikasi antar umat beragama. *Menyama braya* mengandaikan kesamaan, kesetaraan dan juga penghargaan satu sama lain. Atas dasar

semangat inilah para pemuka agama dan juga atas inisiatif masing-masing lembaga diupayakan pertemuan demi pertemuan untuk berkomunikasi dan tukar menukar informasi satu sama lain. Mula-mula dalam lingkup yang kecil dan terbatas, namun kemudian bermitra dengan pemerintah – dalam hal ini Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan Propinsi – untuk terjun ke masing-masing kabupaten/kota untuk meningkatkan komunikasi dan saling informasi tentang persoalan-persoalan berkaitan dengan hal-hal yang berpeluang menimbulkan ketegangan antar umat beragama.

Prinsip dan semangat *menyama braya* ini sudah menjadi komitmen bersama, bahwa di atas segala-galanya komunikasi menjadi penting. Hanya melalui komunikasi, kerukunan dan selanjutnya kerjasama bisa ditingkatkan. Disamping itu, kepentingan bersama dalam membangun republik ini adalah aspek lain yang memang perlu senantiasa diperjuangkan. Mulai dari lingkaran yang paling kecil, semangat ini bisa ditularkan ke daerah-daerah lain. Buktinya, banyak kunjungan dan undangan yang diterima oleh FKAUB Bali untuk mensharingkan pengalaman *menyama braya*. Ada dua hal yang selalu kita tekankan dalam prinsip, *menyama braya* ini yaitu bahwa kerukunan yang mau diperjuangkan tidak pernah tuntas untuk diselesaikan. Kedua, keamanan rumah ibadah menjadi tanggungjawab bersama.

Sesungguhnya prinsip *menyama braya* ini telah mendapat pijakan yang kuat dari masing-masing lembaga agama. Dalam agama Islam, *ukhuwah* dan silaturahmi adalah istilah yang sudah bersama-sama dipahami sebagai wujud kerinduan untuk bersaudara dengan semua orang. Dalam agama Kristen, saling mengasihi dan menyayangi sesama seperti menyayangi diri sendiri adalah pernyataan yang sering juga diwacanakan. Dalam agama Hindu, *Tat Twam Asi* adalah istilah yang penuh makna, yang memahami keutuhan dan ketunggalan umat manusia. Sedangkan dalam agama Budha, hidup saling berbagai adalah wujud persaudaraan yang paling konkrit. Sedangkan dalam Khonghucu, dikenal istilah *Shu* di mana kepada sesama manusia kita harus bersikap tenggang rasa / kasih tepasalira (Ws. Adjie Djandra, 2006/hal. 71).

Khususnya dalam konteks masyarakat di Bali, wujud *menyama braya* dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali yang berupaya membangun kerukunan dan keharmonisan dengan semua orang. Lebih khusus lagi dalam konteks hubungan antar umat beragama, umat Muslim disebut sebagai *nyama selam*. Keberadaan mereka diakui di masing-masing kawasan/kapupaten. Misalnya di Buleleng, dikenal Desa Pegayaman; di Jembrana dikenal Desa Loloan, di Karangasem ada Desa Nyuh Kuning dan Dese Sideman, di Klungkung ada Desa Gelgel, di Denpasar ada Desa Kepaon (Ida Bagus Gede Wiyana 2008) Keberadaan ini bila dirunut lebih jauh ternyata mempunyai

sejarah yang sangat panjang. Dengan demikian, kalau kerukunan diwacanakan dalam konteks kesatuan Negara Republik Indonesia, maka *menyama braya* yakni hidup sebagai saudara adalah keinginan leluhur masyarakat Bali untuk hidup rukun sebagai saudara. Implementasinya perlu dikongkritkan, lebih-lebih bila berhadapan dengan konflik atau persoalan yang bernuansa agama. Misalnya pembangunan rumah ibadat, perpindahan penduduk, penyebaran agama, perkawinan beda agama, maupun perayaan hari-hari besar keagamaan.

5. Pandangan Gereja Katolik

Gereja Katolik sama sekali tidak ada persoalan berkaitan dengan upaya membangun persaudaraan (*menyama braya*). Adalah wajib hukumnya kita membangun persaudaraan dengan semua orang. Tidak seorangpun memandang rendah sesamanya semata-mata karena perbedaan. Manusia dalam dirinya sendiri adalah makhluk Tuhan yang mempunyai martabat, keunikan dan kepribadian. Bahkan Tuhan sendiri menghargai kebebasan manusia itu, sehingga manusia menjadi makhluk yang sangat otonom. Namun demikian manusia senantiasa dipanggil untuk hidup rukun dengan sesamanya dan juga dengan semua makhluk baik yang ada di laut, darat maupun udara karena Tuhanlah Penciptanya (bdk. Kej 1: 1- 31).

Dalam mengimplementasikan upaya mewujudkan persaudaraan (*menyama braya*), Gereja Katolik memang tidak lepas dari kendala, lebih-lebih karena eksklusivitas yang melekat dalam dirinya. Misalnya berkaitan dengan dakwah atau penyebaran agama; isu kristenisasi juga menjadi problem tersendiri yang bisa menghambat dan mengganggu kerukunan hidup beragama. Seringkali upaya-upaya pewartaan (dakwah) menjadi sorotan lebih-lebih karena cara-cara yang dianggap terselubung di balik karya-karya kemanusiaan yang bersifat sosial karitatif. Namun, Gereja Katolik, khususnya setelah Konsili Vatikan II (1962-1965) sudah banyak mengupayakan perubahan, terutama dalam merumuskan kembali makna misi dan evangelisasinya. Tidak lagi melihat gereja sebagai bagian yang terpisah dari dunia ini melainkan sebagai bagian yang integral. Tidak menjadikan yang lain sebagai obyek tetapi sebagai subyek dengan tugas yang sama menghadapi problem-problem dunia.

Pandangan yang berubah ini mendorong Gereja Katolik untuk terus mengembangkan dialog. Dalam hal ini, Gereja Katolik tertarik mengembangkan 4 model dialog atas dasar pro-eksistensi. *Pertama* dialog teologis adalah dialog berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran atau teologi yang diharapkan muncul pemahaman akan keyakinan dan prinsip yang berbeda dari masing-masing agama baik yang sifatnya eksklusif maupun inklusif. *Kedua*,

dialog iman, adalah dialog berkaitan dengan pengalaman eksistensi kita sebagai makhluk Tuhan dengan segala problem yang kita hadapi sebagai manusia seperti, kemiskinan, kematian, kesepian, kedosaan dll. *Ketiga*, dialog karya, adalah dialog dalam wujud yang paling konkrit yakni kerjasama dalam mengatasi persoalan-persoalan kemanusiaan. *Keempat* adalah dialog kehidupan, yakni perjumpaan kita dengan sesama. Kita menaruh simpati dan empati kepada sesama kita lebih-lebih saudara-saudara kita yang dekat dengan kita, yang selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari tanpa memandang perbedaan sebagai sesuatu yang prinsip.

Upaya untuk mewujudkan itu memang tidak gampang lebih-lebih karena perbedaan dalam pandangan baik intern maupun antar umat beragama itu sendiri. Dalam Gereja Katolik bahkan dialog itu dianggap sebagai ancaman dalam upaya misi gereja, namun di lain pihak, dialog adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Bumi ini adalah hunian kita bersama, sehingga perdamaian adalah perjuangan kita bersama. Keberagaman adalah kehendak Tuhan sehingga pilihan yang terbaik adalah melakukan yang terbaik bagi semua. Memang setiap orang atau kelompok mempunyai kepentingannya sendiri namun di atas segalanya adalah cintakasih. Atas dasar inilah, *menyama braya* terbuka untuk semua orang sehingga kita wajib untuk saling mendoakan satu sama lain. Jangankan yang kita pandang sebagai sahabat, mereka yang berseberangan dengan kita, yang kita anggap sebagai musuh adalah kewajiban kita untuk saling mendoakan (bdk Mat 5:44).

6. Penutup.

Menyama braya pada dasarnya adalah keinginan untuk hidup rukun sebagai saudara. Di dalamnya kita saling menghargai satu sama lain atas dasar kesamaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Setiap orang ingin diperlakukan sebagai saudara yang pada akhirnya ingin mewujudkan masyarakat umat manusia yang damai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Menyama braya adalah salah satu karakter khas masyarakat Bali, yang ingin merangkul semua orang sesuai dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Memang selalu ada kendala-kendala dalam mewujudkan upaya membangun persaudaraan. Namun di atas semuanya itu, nilai-nilai agama telah memperkuat keyakinan kita akan panggilan untuk hidup sebagai saudara.

Menyama braya adalah sumbangan masyarakat Bali untuk menciptakan Indonesia yang aman, dinamis dan sejahtera. Masing-masing diharapkan bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan keyakinan masing-masing dan berupaya untuk terus meningkatkan kerjasama di berbagai bidang kehidupan.

Menyama braya berakar dalam tradisi dan agama masing-masing yang maknanya bermuara pada kesetaraan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat. *Menyama braya* adalah gerbang utama kerukunan.

* * * * *